

## **Menyulap Etika dan Laba: Mengapa Profit Tanpa Integritas Tidak Bisa Bertahan dalam Tata Kelola Modern**

**Viorelia Claressa Fritzzy<sup>1</sup>, Citra Eka Agustin<sup>2</sup>, Rohmawati Kusumaningtias<sup>3</sup>, Ambar Kusumaningsih<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: [viorelia.23416@mhs.unesa.ac.id](mailto:viorelia.23416@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [citra.23483@mhs.unesa.ac.id](mailto:citra.23483@mhs.unesa.ac.id)<sup>2</sup>,  
[rohmatikusumaningtias@unesa.ac.id](mailto:rohmatikusumaningtias@unesa.ac.id)<sup>3</sup>, [ambarkusumaningsih@unesa.ac.id](mailto:ambarkusumaningsih@unesa.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Di era globalisasi dan tata kelola perusahaan modern, banyak perusahaan yang berfokus pada pencapaian keuntungan finansial jangka pendek, yang sering kali mengorbankan prinsip-prinsip etika dan integritas. Namun, sejarah bisnis menunjukkan bahwa perusahaan yang mengabaikan etika cenderung gagal dalam jangka panjang, baik dalam bentuk kerugian finansial, kerusakan reputasi, atau bahkan kebangkrutan. Dalam lanskap bisnis kontemporer, tata kelola perusahaan yang efektif tidak dapat dipisahkan dari integrasi nilai-nilai etika. Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara etika dan pencapaian laba dalam konteks tata kelola perusahaan modern dengan menggunakan tinjauan literatur dan metode analisis kasus. Dengan metode tersebut, disimpulkan bahwa laba yang dicapai tanpa landasan etika yang kuat berisiko tidak berkelanjutan. Budaya perusahaan yang beretika terbukti dapat memperkuat reputasi perusahaan, loyalitas pemangku kepentingan, dan ketahanan jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan integrasi prinsip-prinsip etika dalam sistem tata kelola sebagai pendekatan strategis untuk mencapai kinerja keuangan yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Etika Bisnis, Keberlanjutan, Laba, Integritas*

### **Abstract**

In the era of globalization and modern corporate governance, many companies focused on achieving short-term financial gains, often at the expense of ethical principles and integrity. However, business history showed that companies that ignored ethics tended to fail in the long run, whether through financial losses, reputational damage, or even bankruptcy. In the contemporary business landscape, effective corporate governance was inseparable from the integration of ethical values. This study explored the relationship between ethics and profit achievement in the context of modern corporate governance using a literature review and case analysis method. The findings indicate that profits achieved without a strong ethical foundation risk being unsustainable. An ethical corporate culture strengthens corporate reputation, stakeholder loyalty, and long-term resilience. This research recommends integrating ethical principles into governance systems as a strategic approach to achieving sustainable financial performance.

**Keywords :** *Business Ethics, Sustainability, Profit, Integrity*

### **PENDAHULUAN**

Setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya pada pertengahan tahun 1997, corporate government (juga dikenal sebagai "tata kelola perusahaan") telah menjadi topik diskusi yang sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa yang akan datang (Zhuang et al., 2001). Baird (2000) juga menyatakan bahwa pelaksanaan corporate governance yang buruk di hampir semua perusahaan, baik BUMN maupun swasta, adalah salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia dan banyak negara Asia lainnya.

Menurut beberapa ahli, salah satu faktor utama yang menyebabkan keruntuhan ekonomi di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya adalah kekurangan sistem tata kelola perusahaan yang

baik. Tata kelola perusahaan, adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai sistem, aturan, dan strategi yang dirancang untuk mengelola perusahaan dan didasarkan pada prinsip akuntabilitas, yang dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Velnampy, 2013). Manajemen menggunakan sistem tata kelola perusahaan untuk mengatur dan mengawasi operasinya. Oleh karena itu, tata kelola yang baik dapat meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan bagi pemegang saham dalam jangka panjang. Pada kajian tahun 1998 oleh Booz-Alen & Hamilton (seperti yang dikutip oleh Djailil, 2000) menemukan bahwa indeks good corporate governance di Indonesia paling rendah dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang. Studi yang sama juga menemukan bahwa indeks efisiensi hukum dan peradilan juga paling rendah.

Negara-negara Asia Timur yang mengalami krisis 1999, terutama Indonesia, mulai pulih. Kejadian tersebut memberikan banyak pelajaran serta kesadaran tentang kekeliruan lama bahwa bisnis hanya dapat berhasil dan bertahan lama dengan mengandalkan permainan curang. Semakin jelas bahwa etika bisnis yang tata kelola perusahaannya dikelola dengan baik (Good Corporate Governance) sangat penting dan bermanfaat bagi perusahaan yang sedang berkembang. Perusahaan harus menjalankan bisnis mereka dengan etis dan didukung oleh Good Corporate Governance jika mereka ingin sukses dan untung.

Membangun perusahaan tidak hanya tentang proses mencari keuntungan; berbagai pihak, baik eksternal maupun internal, pasti terlibat dalam operasi perusahaan. Perusahaan sekarang harus mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan dan profitabilitas (Hidayat et al., 2021). Untuk melakukannya, kita harus menjalankan bisnis dengan etika bisnis yang baik supaya berkembang dan beroperasi dengan baik.

Tidak dapat disangkal bahwa etika bisnis dapat meningkatkan kinerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat (Wulandari, 2015). Menurut peneliti, bisnis yang beretika baik adalah bisnis yang mempertimbangkan kepentingan pihak berwenang dalam setiap tindakan yang diambilnya. Untuk mencapai tujuan ini, aturan harus dibuat untuk memastikan bahwa bisnis tetap berada dalam batas-batas etis yang dapat diterima oleh sebagian besar anggota perusahaan. Faktor yang memastikan bahwa manajemen tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham dan stakeholder secara keseluruhan adalah etika bisnis.

Bisnis harus memiliki pemerintahan perusahaan yang baik untuk mempertahankan etika bisnis yang baik. Dengan waktu, pemerintahan perusahaan yang baik dapat menjadi batu loncatan bagi perusahaan yang ingin berkembang di seluruh dunia. Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, dimana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Dalam kenyataannya, etika bisnis sering diabaikan dan penerapan manajemen perusahaan yang baik hanya diperlukan untuk mematuhi hukum. Akibatnya, banyak bisnis bertindak tidak sesuai etika, yang merugikan stakeholder. Karena pengawasan sistem kurang efektif dalam manajemen perusahaan, banyak skandal bisnis terjadi. Sebenarnya, dengan pengelolaan check and balance yang baik, hal ini dapat dihindari.

GCG adalah salah satu komponen penting dari keberhasilan bisnis untuk tumbuh dan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang serta memenangkan persaingan di pasar global saat ini. Kegagalan untuk menerapkan GCG dianggap sebagai penyebab krisis ekonomi yang terjadi di Asia dan Amerika Latin (Ahmad, 2005). Banyak perusahaan publik yang runtuh, termasuk London & Commonwealth, Poly Peck, Worldcom, Enron, Tyco, dan Maxwell, antara lain. Kegagalan strategis dan praktik curang di puncak manajemen menyebabkan keruntuhan tersebut, yang tidak dapat dideteksi dalam waktu yang lama karena kurangnya pengawasan perusahaan.

Sebuah pemahaman seperti itu menunjukkan bahwa wawasan perusahaan kurang terbuka, atau perusahaan belum menjalankan governansi (Moeljono & Sudjatmiko, 2005). Korporasi di Indonesia runtuh karena kualitas GCG mereka yang buruk. Menurut etika bisnis, tingkat urgensi harus ditentukan dalam jangka panjang. Jika perusahaan tidak memperhatikan tingkat urgensi

tersebut, itu dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Banyak penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa etika diperlukan dalam bisnis dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengaturnya (K, 1993). Bisnis Indonesia sudah memiliki etika, tetapi kebanyakan hanya etika sosial dan individual. Etika bisnis masih baru bagi mereka.

Menurut Newel & Wilson (2002), secara teoritis, praktik manajemen perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin diambil oleh dewan untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan secara keseluruhan meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, praktik manajemen perusahaan yang buruk dapat mengurangi kepercayaan investor. Oleh karena itu, korporasi, baik publik maupun terbuka di pasar modal, harus melihat dan menerapkan manajemen perusahaan yang baik sebagai sistem nilai dan best practices yang sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Dunia bisnis di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, yang menunjukkan pentingnya etika dalam setiap proses pengambilan keputusan. Meskipun profitabilitas tetap menjadi tujuan utama, praktiknya memerlukan pertimbangan moral dan sosial. Konsumen, investor, dan regulator biasanya mendukung bisnis yang memiliki reputasi baik untuk waktu yang lama. Perilaku etis perusahaan semakin diharapkan sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan globalisasi. Sayangnya, banyak bisnis Indonesia masih menggunakan praktik manipulatif untuk mencapai target jangka pendek. Hal ini memperburuk reputasi dan kelangsungan bisnis serta mengundang risiko hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa tata kelola yang etis bukan hanya tugas moral tetapi juga strategi bisnis yang cerdas dan berkelanjutan.

### **Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent), di mana manajer diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan demi kepentingan pemilik. Namun, karena adanya kepentingan yang berbeda dan informasi yang asimetris, manajer dapat bertindak oportunistik yang tidak selaras dengan tujuan pemilik, seperti memaksimalkan laba jangka pendek dengan mengabaikan etika. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa konflik keagenan dapat mengakibatkan biaya agensi yang tinggi jika tidak ada mekanisme pengendalian yang tepat. Dalam konteks artikel, pelanggaran etika seperti manipulasi laporan keuangan oleh manajer (misalnya dalam kasus Garuda Indonesia dan Enron) merupakan contoh klasik dari kegagalan kontrol dalam hubungan agensi.

### **Teori Stakeholder**

Teori stakeholder dikemukakan oleh Freeman (1984) yang menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas perusahaan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Teori ini mendasari bahwa tata kelola korporat yang etis harus mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan dan kepentingan semua pemangku kepentingan. Penerapan etika dalam bisnis tidak hanya melindungi stakeholder dari kerugian akibat penyimpangan, tetapi juga memperkuat loyalitas dan kepercayaan yang berdampak pada keberlanjutan jangka panjang.

### **Teori Tata Kelola Korporat (Good Corporate Governance)**

Teori tata kelola korporat membahas sistem, proses, dan prinsip yang digunakan perusahaan untuk memastikan manajemen bertindak secara transparan, bertanggung jawab, dan beretika. GCG berperan sebagai mekanisme pengawasan dan keseimbangan (check and balance) yang mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Penerapan GCG yang dikombinasikan dengan nilai-nilai etika dapat mencegah praktik-praktik korupsi, memperkuat reputasi, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Menurut Newell & Wilson (2002), GCG yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang oleh manajemen.

#### **Tujuan**

1. Menganalisis hubungan antara penerapan etika bisnis dan pencapaian laba dalam sistem tata kelola perusahaan modern.
2. Mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan perusahaan akibat pengabaian prinsip etika.

3. Merumuskan kerangka sistem tata kelola perusahaan yang mampu menyeimbangkan antara etika dan profitabilitas.
4. Mengevaluasi peran budaya korporasi berbasis etika dalam memperkuat reputasi dan ketahanan perusahaan jangka panjang.

## **METODE**

Penelitian ini berfokus pada hubungan antara profit dan etika dalam konteks tata kelola korporat modern. Kerangka pemikiran dimulai dari urgensi penelitian, yaitu pentingnya memahami bagaimana integritas dan etika bisnis dapat menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan bisnis. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, perusahaan seringkali dihadapkan pada dilema antara mencapai target keuntungan dan mempertahankan prinsip-prinsip etika. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menganalisis kasus-kasus perusahaan besar yang terjerat skandal etika, serta perusahaan yang berhasil memadukan etika dan profitabilitas. Teori yang digunakan termasuk teori stakeholder dan teori tata kelola perusahaan, yang memberikan dasar untuk memahami bagaimana kepentingan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dapat diintegrasikan dalam strategi bisnis. Penelitian ini juga mengusulkan kerangka kerja baru untuk memahami bagaimana perusahaan dapat membangun sistem tata kelola yang menyeimbangkan etika dan profitabilitas, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti budaya korporasi, peran dewan direksi, dan implementasi prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hubungan antara Profit dan Etika dalam Konteks Tata Kelola Korporat**

Etika bisnis berperan penting dalam membentuk kerangka kerja yang mengarahkan perusahaan dalam menyeimbangkan antara pencapaian laba dan tanggung jawab sosial. Menurut OECD (2015), akuntabilitas pemerintah, transparansi, prinsip keadilan, dan etika bisnis mencakup nilai-nilai yang melekat. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai fondasi utama untuk memastikan keberlanjutan perusahaan. Friedman (1970) menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, pendekatan modern menambahkan bahwa keuntungan tidak dapat dipisahkan dari legitimasi sosial perusahaan (Freeman et al., 2007). Oleh karena itu, nilai-nilai etis digunakan sebagai prinsip mendasar dalam pengembangan pedoman dan strategi bisnis perusahaan. Studi oleh Randio et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis meningkatkan kinerja karyawan hingga 70,9%. Mufida, Gorontalo. Ini membuktikan bahwa profitabilitas dan etika terkait erat.

Maulana dan Haryadi (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa etika bukan hanya menjadi nilai internal, tetapi juga menjadi pilar dalam membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat keunggulan bersaing. Dalam lanskap bisnis yang semakin kompleks, reputasi menjadi elemen penting yang mendorong kesinambungan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus menyelaraskan prinsip GCG dengan etika agar tata kelola korporat tidak hanya bersifat formalitas.

Perusahaan yang memasukkan etika ke dalam kebijakan mereka akan memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Keyakinan ini meningkatkan hubungan bisnis dan meningkatkan peluang kerja sama strategis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Metode pengambilan keputusan strategis berbasis etika menghasilkan keuntungan jangka panjang melalui peningkatan loyalitas pelanggan dan daya tarik investor. Untuk tata kelola yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, etika digunakan. Profit dan etika sekarang saling mendukung, bukan lagi bertentangan. Kedua elemen ini dapat bekerja sama untuk menciptakan nilai perusahaan dalam konteks tata kelola kontemporer. Etika bisnis meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik internal, dan meningkatkan moral karyawan. Dengan demikian, pendekatan etis tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang unggul.

### **Pengaruh Budaya Korporasi yang Fokus pada Etika terhadap Jangka Panjang Perusahaan**

Budaya korporasi yang mengutamakan nilai-nilai etis menciptakan stabilitas organisasi yang kuat. Budaya korporasi yang kuat dan etis menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan

harmonis. Perusahaan yang menanamkan prinsip etika dalam budaya kerja mampu meningkatkan kinerja karyawan, mengurangi konflik internal, dan menumbuhkan rasa kepemilikan. Budaya tersebut juga memberikan dasar moral yang membentuk perilaku kolektif yang mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Etika yang diinternalisasi dalam perilaku organisasi mendorong karyawan untuk bekerja dengan integritas, tanggung jawab, dan komitmen tinggi. Sebuah studi pada PT Nesia Pan Pacific menunjukkan bahwa budaya etika dalam perusahaan mampu meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja, sehingga berkontribusi langsung pada hasil bisnis yang positif.

Karyawan yang bekerja dalam lingkungan etis cenderung menunjukkan loyalitas tinggi, yang berdampak pada rendahnya tingkat turnover dan tingginya komitmen organisasi. Hal ini sangat penting dalam menghadapi persaingan global, di mana keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kualitas dan stabilitas sumber daya manusianya. Budaya organisasi yang menekankan integritas menciptakan stabilitas internal dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan (Schein, 2010). Penelitian oleh Valentine dan Barnett (2007) menunjukkan bahwa perusahaan dengan budaya etika yang kuat memiliki tingkat retensi karyawan dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Budaya ini memperkuat nilai merek dan memperkecil risiko skandal yang merusak reputasi. Yulia (2023) menekankan bahwa budaya perusahaan yang dibangun atas dasar nilai-nilai etika mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Ia juga menunjukkan bahwa reputasi perusahaan yang berbasis integritas mendorong loyalitas konsumen, yang pada gilirannya berpengaruh langsung pada keberlanjutan usaha. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, reputasi dapat menyebar dan memengaruhi publik hanya dalam hitungan detik.

Konsistensi dalam menerapkan etika sebagai bagian dari budaya organisasi tidak hanya mencegah konflik internal dan eksternal, tetapi juga menjadi dasar terciptanya sinergi antar departemen. Budaya ini akan mempengaruhi cara perusahaan membangun relasi dengan mitra, regulator, dan publik. Dalam jangka panjang, hal ini menjadi sumber keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Perusahaan dengan reputasi etis memiliki daya tarik yang lebih besar terhadap investor dan mitra bisnis. Ketika nilai-nilai etika dijalankan secara konsisten, perusahaan membangun kredibilitas yang sulit ditandingi oleh pesaing. Dalam jangka panjang, hal ini membantu perusahaan bertahan dalam dinamika pasar yang fluktuatif dan meningkatkan keberlanjutan bisnis.

### **Alasan Perusahaan yang Mengabaikan Prinsip Etika Seringkali Mengalami Kegagalan**

Perusahaan yang mengesampingkan prinsip etika cenderung terjebak dalam praktik tidak sehat yang merusak nilai bisnis jangka panjang. Misalnya, pelaporan keuangan yang dimanipulasi atau suap dalam pengadaan barang dan jasa dapat memberikan keuntungan sesaat, tetapi memicu kerugian besar jika terungkap.

Efek negatif dari pelanggaran etika tidak hanya berdampak pada citra, tetapi juga operasional perusahaan. Ketika kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis hilang, akses terhadap pendanaan dan peluang bisnis menjadi semakin terbatas. Dalam kasus-kasus ekstrem, perusahaan bisa mengalami kebangkrutan akibat boikot konsumen atau litigasi hukum yang berlarut-larut.

Pengabaian terhadap prinsip-prinsip etika dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara finansial maupun reputasional. Perusahaan seperti PT Garuda Indonesia pernah mengalami guncangan besar akibat manipulasi laporan keuangan dan praktik tidak etis lainnya. Skandal tersebut bukan hanya menurunkan harga saham, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik dan menghambat operasional jangka panjang.

Fenomena ini menunjukkan bahwa etika tidak bisa dipisahkan dari kelangsungan perusahaan. Tanpa komitmen terhadap prinsip moral dan integritas, perusahaan akan kehilangan pondasi untuk bertumbuh dan bersaing secara sehat. Dalam era keterbukaan informasi seperti saat ini, pelanggaran etika akan lebih mudah terdeteksi dan disorot oleh publik, menjadikannya ancaman serius bagi eksistensi korporasi.

Maulana & Haryadi (2022) menggarisbawahi bahwa etika merupakan instrumen perlindungan perusahaan terhadap penyimpangan perilaku manajerial. Ketika prinsip ini diabaikan,

risiko hukum meningkat, kepercayaan pasar turun, dan citra perusahaan hancur. Lebih jauh, pelanggaran etika juga memicu hilangnya talenta karena ketidakpuasan karyawan terhadap lingkungan kerja yang tidak sehat.

Perusahaan yang mengabaikan prinsip-prinsip etika cenderung mengembangkan budaya permisif terhadap pelanggaran, yang dapat mengakibatkan skandal hukum dan reputasi. Ketika tata kelola hanya menitikberatkan pada kepatuhan hukum (compliance) tanpa internalisasi etika, perusahaan mudah jatuh pada praktik manipulatif demi kepentingan jangka pendek. Kegagalan ini mencerminkan pentingnya nilai etika sebagai mekanisme kontrol non-formal yang lebih efektif dalam mencegah deviasi perilaku.

Efek domino dari pelanggaran etika mencakup pemutusan kontrak kerja sama, hengkangnya investor, dan pembatasan akses pembiayaan. Dalam beberapa kasus, kerugian akibat skandal etika bahkan lebih besar daripada kerugian operasional biasa. Oleh sebab itu, perusahaan yang mengabaikan prinsip etika menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat rentan terhadap kehancuran.

### **Analisis Kasus Perusahaan Besar yang Terjerat Skandal Etika**

Suhartono et al. (2021) membahas kasus yang melibatkan PT. Garuda Indonesia dan PT. Sriwijaya Air, di mana terdapat praktik rangkap jabatan oleh direktur utama Garuda yang juga menjabat sebagai komisaris utama di Sriwijaya. Praktik ini dinilai merugikan persaingan usaha karena memberikan peluang bagi Garuda untuk mengendalikan aktivitas bisnis Sriwijaya, yang sebenarnya merupakan kompetitor langsungnya. Situasi semacam ini dianggap tidak etis karena menciptakan persaingan yang tidak sehat dan berpotensi merugikan pihak lain dalam industri penerbangan.

Pada tahun 2019, skandal yang melibatkan PT Garuda Indonesia, kasus penyelundupan barang mewah dan laporan keuangan yang dimanipulasi menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan internal dan lemahnya implementasi prinsip GCG. Menurut laporan BPK dan Kementerian BUMN, tindakan tersebut menyebabkan kerugian material dan non-material serta mencederai kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah tersebut (Kompas). Hal ini menyebabkan intervensi dari Kementerian BUMN dan penggantian direksi besar-besaran sebagai bentuk pemulihan kepercayaan publik.

Kasus lain yang tak kalah mencolok adalah yang menimpa PT Jiwasraya. Perusahaan asuransi milik negara ini terlibat dalam praktik investasi fiktif dan manipulasi neraca keuangan, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Kelalaian dalam pengawasan internal dan rendahnya integritas manajemen menjadi akar utama permasalahan tersebut.

Enron Corporation, yang dulunya perusahaan raksasa energi Amerika, runtuh dalam kehancuran yang dramatis pada tahun 2001. Kasus ini menjadi simbol dari penipuan laporan keuangan terbesar dalam sejarah. Dengan memanipulasi pembukuan dan menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan utang, Enron mampu memproyeksikan citra keuangan yang kuat dan sehat. Namun, kenyataannya jauh dari itu. Ketika kebenaran terbongkar, Enron terpaksa menyatakan kebangkrutan, menyebabkan ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan investasi miliaran dolar menguap. Kasus ini menunjukkan bagaimana ketidakjujuran dalam laporan keuangan dapat meruntuhkan kepercayaan publik dan menghancurkan perusahaan dalam sekejap.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etika bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga merugikan masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan tidak langsung. Hal ini memperkuat urgensi perlunya sistem tata kelola yang menempatkan etika sebagai prinsip utama dalam setiap lini operasional. Skandal tersebut menjadi pembelajaran penting bahwa etika bukan sekadar aksesori, tetapi pondasi bagi kelangsungan institusi bisnis.

Studi Yulia (2023) juga menyoroti berbagai kasus di sektor swasta yang mengalami stagnasi hingga kebangkrutan akibat pengabaian etika dalam pengelolaan SDM dan komunikasi korporasi. Dengan kata lain, etika bukan hanya menyangkut kepatuhan hukum, tetapi merupakan prasyarat bagi keberlanjutan bisnis. Kasus-kasus ini memberikan pelajaran penting bagi perusahaan agar tidak menjadikan laba sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan.

## **Membangun Sistem Tata Kelola yang Menyeimbangkan Etika dan Profit**

Untuk membangun sistem tata kelola yang etis dan berorientasi pada profit, diperlukan regulasi internal yang kuat dan terintegrasi. Untuk menciptakan tata kelola yang berkelanjutan, perusahaan harus mengintegrasikan prinsip etika ke dalam seluruh lapisan organisasi. Ini mencakup: (1) penguatan kode etik perusahaan; (2) pelatihan etika berkala; (3) sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan anonim (whistleblowing system); dan (4) pembentukan dewan direksi yang independen dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang (Arjoon, 2005). Lebih lanjut, pengadopsian kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin menjadi tolok ukur keberhasilan tata kelola modern. Salah satu pendekatan efektif adalah implementasi code of conduct yang menjadi panduan etis dalam bertindak bagi seluruh elemen organisasi. Code of conduct yang dirancang dengan baik mampu mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar operasional.

Selanjutnya, perusahaan harus memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang aman dan responsif. Mekanisme ini memungkinkan karyawan untuk melaporkan tindakan yang tidak etis tanpa takut akan pembalasan. Studi oleh Utami (2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi sistem whistleblowing secara aktif mengalami penurunan jumlah kasus fraud hingga 30% dalam dua tahun pertama penerapannya.

Pendidikan dan pelatihan etika secara berkala juga penting dilakukan untuk menjaga konsistensi nilai di lingkungan kerja. Hal ini tidak hanya membentuk karakter individu yang bertanggung jawab, tetapi juga menciptakan budaya korporasi yang tahan terhadap godaan pelanggaran. Dengan sinergi antara struktur pengawasan, regulasi internal, dan pembangunan budaya organisasi yang sehat, perusahaan dapat menyeimbangkan antara tuntutan profit dan komitmen terhadap etika.

Maulana & Haryadi (2022) menegaskan bahwa penerapan prinsip GCG yang dipadukan dengan nilai etika dapat menjadi landasan yang kokoh dalam sistem tata kelola perusahaan. Mereka menyarankan agar perusahaan mengadopsi sistem pelaporan ganda yang tidak hanya mengukur aspek keuangan, tetapi juga indikator etis seperti kepuasan pemangku kepentingan dan tanggung jawab sosial.

Yulia (2023) menyarankan agar sistem tata kelola modern memfasilitasi pelibatan stakeholder, pelaporan keberlanjutan, serta whistleblowing system yang efektif. Dengan demikian, tata kelola yang menyeimbangkan profit dan etika tidak hanya memperkuat daya saing perusahaan, tetapi juga memperluas legitimasi sosialnya di mata publik.

## **SIMPULAN**

Profitabilitas dan etika bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua elemen yang harus berjalan seiring dalam tata kelola perusahaan. Perusahaan yang mengintegrasikan etika dalam strategi bisnisnya tidak hanya meraih kepercayaan pemangku kepentingan, tetapi juga membangun ketahanan jangka panjang. Profit tanpa integritas pada akhirnya akan runtuh di bawah beban ketidakpercayaan dan sanksi sosial maupun hukum. Etika bukanlah penghalang bagi kesuksesan finansial, melainkan pilar yang menopang keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, menyeimbangkan antara orientasi profit dan nilai-nilai etika bukan hanya keharusan moral, tetapi juga strategi bisnis yang rasional dan adaptif di era tata kelola modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, D. M. (2005). *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya Di Indonesia*. In Akuntansi.
- Chinn, Richard. (2000). *Corporate Governance Handbook*, Gee Publishing Ltd.
- Dwiridotjahjono, J. (2009). Penerapan good corporate governance: Manfaat dan tantangan serta kesempatan bagi perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(2).
- Freeman, R. E. (2015). Stakeholder Theory. *Wiley Encyclopedia of Management*, 1–6. <https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom020179>
- Hasoloan, A. (2018). Peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. *Warta Dharmawangsa*, (57).
- K, B. (1993). *Etika Bisnis Menjadi Urusan Siapa*.

- Lawrence, A. T., & Weber, J. (2020). *Business and Society : Stakeholders, Ethics, Public Policy* (16th ed.). McGraw-Hill Education.
- Monks, Robert A.G, dan Minow, N. (2003). *Corporate Governance 3 rd Edition*.
- Maulana, I., & Haryadi, B. (2022). Etika bisnis, corporate governance, dan stakeholder. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 12(2), 55-62.
- McKinsey & Company, 2002, *Global Investor Opinion Survey 2002 : Key Findings*, July, <http://www.McKinsey.com/Governance>
- Moeljono, D., & Sudjarmiko, S. (2005). *Good Corporate Culture Sebagai Inti Good Corporate Governance*. In Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Monks, Robert A.G, dan Minow, N. (2003). *Corporate Governance 3 rd Edition*.
- Robin, D. P., & Reidenbach, R. E. (1987). Social Responsibility, Ethics, and Marketing Strategy: Closing the Gap between Concept and Application. *Journal of Marketing*, 51(1), 44. <https://doi.org/10.2307/1251143>
- Sakir, A. S. (2024, November 25). Ethics over profits: Corporate governance in the fight against corruption. *The Business Standard*. <https://www.tbsnews.net/thoughts/ethics-over-profits-corporate-governance-fight-against-corruption-989631>
- Shaw, J. (2003). *Corporate Governance and Risk: A System Approach*.
- Silalahi, G. A. (2003). *Strategi Etika Bisnis dan Studi Kasus*.
- Suhartono, S., Syariati, N. E., Fajrin, F., Jannah, R., & Anwar, P. H. (2021). Fenomena Fraud Bumn: Dua Kapal Satu Nakhoda (Studi Kasus PT Garuda Indonesia Tbk - PT Sriwijaya Air). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(1), 68–84. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/23875>
- Velnampy, T. (2013). *Corporate Governance and Firm Performance: A Study of Sri Lankan Manufacturing Companies*. *Journal of Economics and Sustainable Development* Vol. 4 (3), 228-235.
- Yulia, R. A. (2023). Etika Dalam Perusahaan Sebagai Hasil Dari Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. *AKUNTANSI* 45, 4(1), 92-96.
- Zhuang, J., Edwards, D., dan Capulong, M. V. A. 2001. *Corporate Governance and Finance in East Asia, A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand*. Volume Two, Asian Development Bank, Philippines.